

**CSR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(STUDI IMPLEMENTASI CSR-PTBA DI MUARA ENIM, SUMATRA  
SELATAN)<sup>1</sup>**  
*(CSR and Community Development (Implementation Studies of CSR in PTBA in  
Muara Enim, South Sumatra Province) \**

**Partini**

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada  
Bulaksumur, Yogyakarta  
Email: partinislg@yahoo.co.id

Diterima: 18 Januari 2013

Disetujui: 22 Februari 2013

**Abstrak**

Salah satu program CSR-PTBA adalah merelokasi permukiman penduduk di wilayah Atas Dapur dan sekitarnya yang telah tumbuh menjadi daerah kumuh karena sanitasi dan lingkungan hidup mengalami polusi. Adanya Kebijakan Pengembangan dan Penataan Tata Ruang Kota Pemda Tanjung Enim, permukiman penduduk di wilayah ini tidak sesuai lagi peruntukannya karena akan dijadikan TAHURA. Banyak kendala yang ditemui, antara lain masalah *trust*, persepsi, motivasi dan partisipasi warga yang direlokasi. Hasil penelitian menemukan adanya *best practices* dari kebijakan PTBA yang mampu memberdayakan masyarakat dengan memberikan hak milik atas tanah dan bangunan serta sarana pendukung yang lengkap untuk kepentingan umum. Dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap PTBA, PSLH-UGM melakukan penelitian, memediasi dan mensosialisasikannya, sehingga tidak muncul konflik kepentingan dan tidak terjadi konflik yang manifest.

Kata kunci: CSR, Relokasi, Mediasi dan *Community Development*

**Abstract**

*One of the programs is CSR-PTBA, which involves the relocation of residents of Atas Dapur and surrounding areas. The area has become a slum due to increasingly poor sanitation, and environment. Based on the new policy on development and spatial reorganization adopted by Tanjung Enim city, the area is no longer residence but will become peoples forest area (TAHURA). The execution of the program has encountered many obstacles which ranged from distrust, poor perception, low motivation and minimal participation of the people who were relocated. The research identified best practices from PTBA policy, which included the empowerment of relocated people through providing them with land and building certificates, and establishment of self containing supporting facilities and services. To avert the danger of new conflicts of interest as well as out blown conflicts, the center for environment studies Gadjah Mada University (PSLH-UGM), conducted research, facilitated mediation and carried out socialization of program outcomes, all of which were aimed at restoring public trust in PTBA program.*

*Key word: CSR, Relocation, Mediation and Community Development*

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh PSLH-UGM bekerjasama dengan Pertambangan Batubara Milik Negara di Bukit Asam, Palembang, Sumatra Selatan. Judul aslinya: Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya Program Relokasi Penduduk dan TPU Atas Dapur Susunan Peneliti: DR. Partini, Prof Dr. Heddy Sri Ahimsa Putra, Drs. Suparjan, Wahyu Yun Santoso, SH. MHum dan Aditya L. Ramadona MSi.

## PENDAHULUAN

Permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, kini semakin rumit, terutama yang berkaitan dengan perusahaan dan pertambangan

Hal ini telah mendorong pemerintah melakukan regulasi, untuk menerapkan secara aktif program tanggung jawab perusahaan dan menciptakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Keputusan Menteri. Seperti misalnya Keputusan Menteri BUMN No. Kep. 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL), UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007, pasal 74 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap perusahaan yang mengutamakan keuntungan "*wajib*" menganggarkan dana perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Adapun besarnya dana untuk itu ditentukan maksimal 2 % dari laba perusahaan, terutama dari perusahaan BUMN. Dana tersebut dipergunakan untuk berbagai kegiatan antara lain: pemberdayaan ekonomi masyarakat, simpan pinjam untuk modal usaha, penataan lingkungan, pembangunan infrastruktur agar perusahaan dan lingkungannya tertata rapi, serasi dan tidak kumuh, karena kekumuhan lingkungan yang ditempati warga masyarakat sekitar akan menurunkan citra perusahaan tersebut.

Penerapan CSR perusahaan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai subyek maupun objek program. Hal ini karena masyarakat adalah salah satu elemen penting dan sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlanjutan perusahaan. Masyarakatlah yang paling merasakan dampak dari berbagai aktivitas produksi yang dilakukan dan dampak tersebut terjadi terutama dampak sosial, ekonomi, budaya dan juga lingkungan

hidup. Dalam hal ini perusahaan dan atau pertambangan tidak dituntut untuk menggantikan posisi pemerintah yang harus melindungi warganya, namun diharapkan dapat membantu dan berperan aktif demi keberlangsungan hidup warga masyarakat di sekitarnya. Jika itu dilakukan, maka akan memberikan efek karambol bagi keberadaan perusahaan pertambangan itu sendiri, secara tidak langsung dapat mendongkrak citra perusahaan pertambangan tersebut di mata masyarakat, bahkan Negara. Pencitraan ini diperlukan agar supaya perusahaan dan atau pertambangan dapat menciptakan *brand-image* yang baik, dan positif. Semakin baik *brand-imagenya* akan semakin populer perusahaan tersebut, dan popularitas yang dapat direngkuhnya akan meningkatkan posisi tawar di hadapan konsumen dan produsen lainnya.

Perseroan Terbatas (PT) Bukit Asam (BA) untuk selanjutnya dalam tulisan ini akan disingkat dengan (PTBA) merupakan salah satu perusahaan dan pertambangan yang dikelola oleh Negara. Setelah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat kini telah *go public*, PTBA semakin eksis dalam aktivitasnya, termasuk dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi (CSR). Persoalan permukiman yang kurang tertata di wilayah pertambangan, menjadi salah satu perhatian PTBA dalam pelaksanaan CSR. Permukiman penduduk yang berada di sekitarnya, merupakan permukiman yang padat dan kumuh, tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, terutama air bersih dan sanitasi. Penduduk di wilayah ini terpaksa setiap hari harus mengantri air bersih dari saluran air bersih PTBA, bahkan beberapa penduduk terpaksa dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan MCK mengambil dari Sungai Enim, sungai yang berada di wilayah permukiman tersebut.

PTBA berada di Kecamatan Lawang Kidul, Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Kota Tanjung Enim kini sedang melakukan penataan dan penyusunan ulang tata ruang Kota. Berdasarkan laporan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Tanjung Enim

tahun 2008 bahwa pemanfaatan ruang di wilayah pertambangan PTBA, tepatnya di wilayah Atas Dapur dan sekitarnya akan digunakan untuk Hutan Wisata atau Taman Hutan Rakyat (TAHURA). Menurut UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem bahwa kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli, dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, serta rekreasi. Penataan Ruang Kota Tanjung Enim ini sesuai Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 889/KTPS/BAPELDALDA / 2005. Berdasarkan Master Plan Penataan Ruang Kota Tanjung Enim, ternyata keberadaan permukiman penduduk di wilayah Atas Dapur dan sekitarnya tidak sesuai lagi dengan kebijakan Kota. Sesuai UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, dari segi fungsinya, TAHURA termasuk salah satu bentuk hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Dalam upaya penataan lingkungan tersebut, PTBA melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan berencana untuk merelokasi permukiman penduduk di wilayah Atas Dapur dan sekitarnya ke wilayah lain yang masih berada dalam satu wilayah Kota Tanjung Enim, yaitu ke Desa Keban Agung. Perpindahan penduduk (baca: istilah Jawa *bedhol desa*.) bukan sesuatu yang mudah dilakukan, karena berkaitan dengan sejarah hidup, mata pencaharian dan lingkungan sosial budaya yang melekat pada komunitas tersebut selama menjalani kehidupan. Pindah rumah identik dengan perpindahan seluruh aspek kehidupan, termasuk memindahkan makam keluarga yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu pertimbangan secara holistic, agar supaya tidak terjadi konflik kepentingan yang lebih luas antarberbagai elemen masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.

### **Masalah Penelitian:**

Sosialisasi awal untuk relokasi penduduk yang dilakukan pada tahun 2008, menimbulkan keresahan warga masyarakat. Berbagai macam tuntutan warga telah disampaikan ke PTBA, dan tuntutan tersebut tidak secara otomatis dapat dikabulkan. Ada perbedaan persepsi antara warga masyarakat dengan perusahaan pertambangan tentang hal ini, kebijakan relokasi tersebut berlarut-larut sampai tahun 2011 belum dapat terlaksana. Muncul ketidakpercayaan (*distrust*) pada PTBA, sehingga warga masyarakat berada dalam posisi yang "ambigu". CSR PTBA yang dipergunakan untuk melakukan Relokasi penduduk dan pemukiman seyogyanya berperspektif keadilan sosial sehingga tujuan CSR sesuai dengan peruntukannya, dan warga masyarakat sekitar perusahaan pertambangan dapat meningkat kesejahteraannya.

Oleh karena itu menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam agar relokasi penduduk (*bedhol desa*) tersebut dapat berjalan secara lancar dan damai serta penataan Kota Tanjung Enim dapat dilaksanakan secara sinergis. Oleh karena itu masalah yang ingin diteliti adalah: ***Sejauh mana kebijakan CSR-PTBA dalam pelaksanaan relokasi penduduk Atas Dapur dan sekitarnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kebijakan Penataan Ruang Tata Kota Tanjung Enim dapat berjalan secara sinergis? Kendala dan harapan apa dari warga masyarakat dalam pelaksanaan relokasi tersebut?***

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mengidentifikasi keberadaan penduduk berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya warga masyarakat yang akan direlokasi dalam menerapkan kebijakan CSR; 2). Mengidentifikasi persepsi, motivasi, dan partisipasi warga masyarakat pada program relokasi dalam pelaksanaan CSR PTBA; 3). Mengidentifikasi kendala dalam proses relokasi dan harapan warga di tempat baru demi terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang berkeadilan social; 4). Memberikan rekomendasi kepada pihak-

pihak terkait agar dari proses sampai pasca relokasi berjalan lancar dan sinergis demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial.

### Kerangka Teori

Tanggung jawab sosial perusahaan, atau lebih dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan konsep yang dipopulerkan oleh John Elkington tahun 1997 melalui bukunya yang berjudul *Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business* (dalam Wibisono, 2007). Elkington memperkenalkan konsep *Triple bottom line* sebagai unsur pokok dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada masalah ekonomi (*profit*) saja, atau *single bottom line*, tetapi juga harus memperhatikan aspek *manusia* serta *aspek lingkungan hidup*. Joyner and Payne (2002) profit memang merupakan tujuan utama untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Namun, manusia yang berada di wilayah perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjaga keberlangsungan perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan diharapkan memiliki komitmen tinggi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya, agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik, tidak terjadi gangguan berarti, mereka hidup berdampingan yang saling menguntungkan. Lingkungan sosial merupakan aspek penting, karena menjaga lingkungan berarti menjaga harmoni, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi warga masyarakat di sekitarnya. *Triple bottom line* merupakan acuan penting agar supaya perusahaan/pertambangan dapat tenang di dalam melakukan aktivitas pertambangannya dengan etis dan manusiawi.

Okoye (2009) menjabarkan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan, meminimalkan dampak negative dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada dua cara pandang perusahaan terhadap CSR, yakni *external*

*driven* dan *internal driven*. *External driven* memandang CSR hanya sekedar basa-basi atau keterpaksaan, ingin mendongkrak citra perusahaan, dan hanya untuk memenuhi kewajiban. Dari perspektif *internal driven* CSR dimaknai sebagai sebuah kewajiban untuk berbagi bersama warga masyarakat sekitar perusahaan, agar dapat hidup berkeadilan sosial.

Wibisono 2007; dan Untung Budi Hendrik, 2008 juga menunjukkan bahwa manfaat bagi perusahaan yang menerapkan CSR dapat mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan, sehingga perusahaan tersebut layak mendapatkan *social licence to operate*, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya, membentangkan akses menuju *market*, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan serta berpeluang mendapatkan penghargaan. Adapun manfaat CSR bagi masyarakat menurut Ambadar (2008), adalah dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, kelembagaan, tabungan, konsumsi dan investasi dari rumah tangga warga masyarakat. Dengan kata lain penerapan CSR sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik bagi perusahaan maupun bagi warga masyarakat sekitar.

Ada berbagai macam model yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan program CSR ini. Carroll (1999); Tanuwijaya, (2008) membagi program CSR ke dalam empat (4) model, yaitu, keterlibatan langsung melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan yang bersangkutan, (2) bermitra dengan pihak lain, (3) mendukung program yang sudah ada dan (4) bergabung dalam suatu konsorsium. Apapun yang dilakukan oleh perusahaan, dalam bingkai satu niat yaitu berbagi dan ingin mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan melalui berbagai macam cara. Yang jelas dalam program CSR ini melibatkan warga masyarakat sekitar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan kebermanfaatannya.

Menurut Moir (2001) ada 3 teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan CSR. Ketiga teori tersebut adalah: teori stakeholder, teori legitimasi dan teori kontrak sosial. Teori stakeholder dipakai untuk melakukan analisis kepada pihak mana perusahaan tersebut seharusnya bertanggung jawab atau untuk menganalisis kelompok mana saja yang memiliki kepentingan dan harus dipertimbangkan perusahaan dalam mengambil keputusan. Teori legitimasi, melihat CSR lebih sebagai usaha untuk mendapatkan legitimasi sosial bagi perusahaan. Perusahaan dihadapkan pada tiga tantangan kunci menghadapi manajemen legitimasi, yaitu meraih, merawat dan memperbaiki legitimasi. Terakhir teori kontrak sosial, menunjukkan bahwa sebuah perusahaan bertindak dengan tanggung jawab bukan hanya karena kepentingan ekonomi komersial semata, tetapi juga harus menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Model CSR yang kini populer adalah konsep *community development*, model seperti ini dianggap lebih efektif karena kegiatannya harus dilakukan secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat, dapat memberdayakan warga masyarakat, akhirnya dapat menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi (Ife, 2002; Mulyadi, 2003). Kemandirian secara ekonomi akan memperpendek gap (kesenjangan) antara masyarakat perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya. Penciptaan lingkungan yang tidak jauh berbeda dengan perusahaan ini justru akan meningkatkan citra perusahaan di mata publik, terutama pada konsumennya. Komisi Eropa 2001 dalam Gemari (2010) mendefinisikan CSR sebagai sebuah konsep di mana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. Isu-isu sosial pantas mendapat pertimbangan moral dan harus mendorong manajer untuk mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Pesan moral tersebut untuk mengingatkan bahwa dalam mencari keuntungan harus dibatasi oleh pertimbangan sosial (Iwao Taka 2000; Susanto, 2007).

Tanggung jawab sosial perusahaan hadir karena menjadi tuntutan komunitas di mana

keberhasilan perusahaan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh komunitas di sekelilingnya, termasuk stakeholdersnya (Marin & Ruiz, 2007; Rahman (2009). Kegiatan pertambangan di dalam menerapkan CSR menggunakan model kegiatan yang berbeda-beda, namun sebagian besar menggunakannya dalam bentuk pemberian donasi. Model seperti ini kurang bermanfaat, karena hanya memenuhi kewajiban formal semata, dan bukan dalam bentuk model pemberdayaan dan kemandirian ekonomi yang lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Dalam konteks seperti ini CSR lebih dimaknai sebagai *charity*, dan menciptakan sikap ketergantungan pada warga masyarakat. Selain itu CSR dalam bentuk dan model *charity*, berarti pihak perusahaan menciptakan citra kedermawanan.

Program CSR di perusahaan PTBA terbagi ke dalam dua hal: Pertama adalah *community development* yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi rakyat dengan tujuan akhir menciptakan *economic sustainability* warga masyarakat sekitar. Dengan basis ini diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kedua, *Community relations* adalah untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya. Pertambangan PTBA sebagai bagian dari masyarakat, segala aktivitas yang dilakukan di wilayahnya diharapkan dapat memberikan manfaat pada warga masyarakat sekitarnya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah perpaduan antara metode kuantitatif (survey) dengan kualitatif, agar supaya fenomena yang terjadi dapat dicermati lebih komprehensif (Newman 1998; Brannen, Julia, 1998, Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989). Survei untuk memperoleh data kuantitatif dengan kuesioner yang diperlakukan sebagai *interview schedule*, sedangkan *indepth interview*, untuk memperoleh data naratif. *Focus Group Discussioun* (FGD) dipergunakan untuk mengetahui aspirasi dan pandangan

masyarakat mengenai berbagai hal yang dianggap penting. Selain itu pendekatan *Participatory research* dianggap dapat melengkapi berbagai macam metode tersebut, karena PRA dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran secara cepat dan tepat dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat (Fernandes, dan Tandon, 1993). Dalam kaitannya dengan pemindahan makam, pengamatan terlibat menjadi alat yang ampuh untuk memahami berbagai macam ritual dan adat kebiasaan yang masih dijalankan, terutama pandangan mereka tentang keberadaan makam. Persoalan ini menjadi peka tatkala berkaitan dengan eksistensi leluhurnya

Sampel penelitian diambil sebanyak 10% dari populasi, sehingga sampel yang diambil sejumlah 101 responden dengan teknik proporsional dan *multi stage random sampling*. Pada tahap pertama menentukan kecamatan secara random, berdasarkan kecamatan yang diambil kemudian menentukan kelurahan dan terakhir menentukan RW sebagai unit terkecil dari permukiman di wilayah tersebut. Berdasarkan sampel dari masing-masing strata tersebut diambil dari jumlah kepala keluarga (KK). Besarnya sampel untuk penelitian kualitatif ditentukan kurang lebih 5-10 % dari sampel survei. Informan yang diambil adalah *stakeholders*, perusahaan dan masyarakat.

Analisis data hasil survei dilakukan dengan pembuatan chart dan bagan, data-data kualitatif dianalisis dengan menggunakan triangulasi. Hasil semua data baik dari survei, indepth interview, FGD, Rapid serta observasi terlibat dianalisis, sehingga data-data tersebut saling melengkapi agar dapat memberikan gambaran utuh tentang kondisi sosial, ekonomi dan cultural dari warga, serta dapat menangkap persepsi, motivasi, kendala dan harapan mereka sehingga relokasi yang dilaksanakan dapat menjadi lebih berperspektif humanis dan berkeadilan sosial.

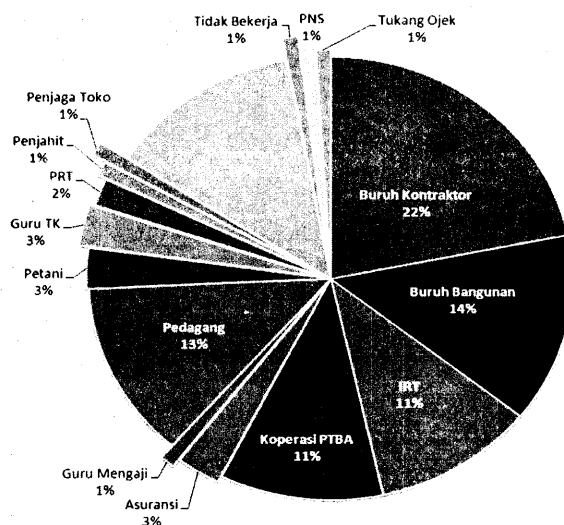
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi sosial, ekonomi dan Pendidikan Warga Masyarakat yang akan Direlokasi

Kelurahan Pasar Tanjung Enim terdiri dari 36 RT dan 7 RW. Wilayah di Kelurahan ini yang terkena rencana relokasi berada di (1) Kampung Atas Dapur, yakni RT 01 dan RT 02; (2) Kampung Karang Tengah, yakni RT 03, dan (3) Kampung Karang Tinah, yakni RT 04, RT 05 dan RT 06. Seluruh RT tersebut berada di lingkungan RW 06. Selain itu desa Lingga yang terkena rencana relokasi, yakni RT 01 yakni di Kampung Bedeng Obak. Berdasarkan survei yang dilakukan penduduk yang pertama akan direlokasi, adalah warga masyarakat di Kampung Atas Dapur dan sekitarnya.

Penduduk yang akan direlokasi sebanyak 71% berusia produktif yaitu berumur antara 15 – 59 tahun, anak-anak yang berumur 0 – 14 tahun sebanyak 22% dan sisanya adalah lansia. Jika dilihat berdasarkan status pendidikannya, sebagian besar responden berpendidikan dasar 9 tahun (50 %), 42 % berpendidikan SLTA, dan 4 % tamat PT dan Akademi. Pendidikan mereka yang rendah berkaitan dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Mata pencaharian mereka sebelumnya agraris, sekarang menjadi penjual jasa, yaitu pedagang kelontong, industry, penyediaan alat kantor dan membuka kedai makanan. Sebagian kecil menjadi karyawan PTBA, dan karyawan pada sub kontraktor yang berada di sekitar PTBA. Diagram Ini akan memperjelas mata pencaharian mereka (Gambar 1).

Warga masyarakat yang akan direlokasi, berada di atas tanah milik PTBA. Mayoritas kepemilikannya didasarkan atas pewarisan atau peralihan hak turun temurun. Sebagian besar warga sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut lebih dari 10 tahun (45%) dan sejak lahir (45%). Sisanya adalah warga pendatang baru, atau suami/isteri dari warga di daerah itu. Pola kepemilikan atas pewarisan atau peralihan hak yang turun temurun ini berdampak pada minimnya pemahaman warga tentang konsep “status



Gambar 1. Diagram Mata pencaharian Responden

kepemilikan” yang legal. Diagram ini akan memperjelas hal tersebut (Gambar 2).

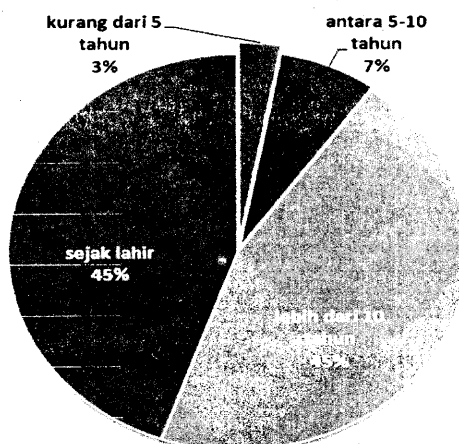
Selain pewarisan, telah terjadi jual beli rumah dan tanah milik PTBA. Hal ini karena kurangnya pengawasan dan ketegasan pihak PTBA terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di tanah milik PTBA. Pola kepemilikan rumah dapat dibedakan menjadi empat macam, yakni: (1) Rumah dinas PTBA, (2) Rumah pribadi dengan izin persil di atas tanah PTBA, (3) Rumah pribadi tanpa izin persil dan (4) Rumah nempel. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ada pemilik rumah yang tidak memanfaatkan secara aktif kepemilikannya. Pemanfaatan rumah dapat dipetakan sebagai berikut: (1). Rumah ditinggali sendiri, (2). Rumah yang disewakan, (3). Rumah ditinggali kerabat/keluarga dan, (4). Rumah ditinggali bersama oleh beberapa keluarga, dan (5) Rumah yang tidak ditinggali sendiri dan dikontrakkan, sementara pemiliknya berada di luar daerah. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan pelaksanaan relokasi menjadi persoalan yang tidak mudah dan rumit

Relokasi yang dilakukan PTBA tidak hanya memindahkan warga masyarakatnya, tetapi juga akan memindahkan tempat pemakaman umum di sekitar wilayah tersebut. Gambar 3 berikut ini dapat dijadikan bukti akan keadaan hal tersebut.

### Persepsi, Motivasi dan Partisipasi Warga Masyarakat dalam Relokasi

Rencana relokasi penduduk dan pemakaman yang dilakukan PTBA pada tahap pertama mencakup 595 KK. Melalui perjalanan panjang, PTBA sejak lama mempersiapkan relokasi, berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan, menyusun *site plan*, dan proses tender dengan kontraktor yang memenuhi persyaratan “Good Corporate Governance”, rangkaian panjang yang butuh waktu lama. Relokasi ini berkaitan dengan pembangunan kota dan Rencana Tata Ruang Pemda. Dinamika internal perusahaan mewarnai proses ini, sehingga pelaksanaan relokasi tertunda-tunda. Sosialisasi dilakukan sejak lama, namun warga merasa ada ketidakjelasan program, sehingga memunculkan kekecewaan terhadap PTBA. Program CSR untuk relokasi penduduk ini adalah menyediakan perumahan yang lebih layak dan lebih sesuai dengan peruntukan pemukiman yaitu di kalurahan Keban Agung. Dipilihnya Desa Keban Agung karena aspek kenyamanan warga, tempat ini jauh dari polusi yang ditimbulkan karena penambangan batubara yang dilakukan oleh perusahaan PTBA.

Berbagai respon masyarakat muncul yang pada dasarnya tidak menolak secara frontal, melainkan minta kepada PTBA, agar



Sumber: Data Primer, 2011

Gambar 2. Diagram Lama Tinggal Penduduk di Wilayah Sekitar PTBA

semua janjinya dapat ditepati. Melalui negosiasi yang cukup panjang dan alot, (karena informasi pelaksanaan relokasi tidak jelas), menimbulkan kegelisahan dan perasaan ambigu di kalangan warga masyarakat. Realitas ini menyebabkan warga masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas rutin kesehariannya dengan tenang, karena mereka akan dipindahkan ke tempat baru yang wilayahnya belum mereka kenal secara baik. Kepindahan semua warga masyarakat dan pemukiman atau “*bedhol desa*” tersebut, sama halnya dengan mencabut kehidupan dan ketenangan mereka dari akar sosial, kulturalnya dan ekonomi yang telah menyatu dalam kehidupan mereka. Hal ini karena sebagian warga bekerja sebagai buruh angkut, tukang ojek dan pedagang di pasar tradisional yang berada di dekat permukiman mereka. Mereka membayangkan bahwa berbagai kegiatan dan akses untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari akan terganggu. Ketidakjelasan program ini berdampak pada ketidakpercayaan warga masyarakat pada program relokasi yang diinisiasi oleh PTBA.

Program relokasi sebenarnya telah bergulir sejak tahun 1997, kini mereka mengalami ketidakpastian hidup. Secara *de jure* rumah yang mereka tempati bukanlah miliknya, karena tanah dan rumah tersebut milik PTBA, tetapi secara *de facto* tempat ini

telah menyatu dengan kehidupan mereka. Bahkan ada beberapa warga yang tinggal di tempat ini secara turun temurun 3 (tiga) generasi, mereka menanti relokasi dalam ketidakpastian, dan tahun 2010 program relokasi baru mengkrystal. Sosialisasi dilakukan semakin intensif, rencana relokasi semakin matang dan tempat untuk merelokasi telah disepakati oleh wilayah penerima.

Sebenarnya warga masyarakat berkeberatan pindah dengan berbagai pertimbangan, antara lain karena kenyamanan ditempat sekarang, (pekerjaan, akses ke pusat perbelanjaan dekat, pendidikan anak dan lain-lain). Mereka enggan pindah ketempat baru karena harus menyesuaikan diri dari awal dengan lingkungan sosial barunya, meski rumah yang sekarang mereka tempati kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

Jika ada anggota keluarga yang membentuk keluarga baru, tidak diizinkan membangun dan atau memperluas rumah tinggalnya, agar tidak menambah kekumuhan dan polusi.

Selain itu lingkungan dan sanitasi di sekitarnya sudah tidak mendukung keberadaan mereka untuk tinggal lebih lama. Ketiadaan air bersih, untuk memenuhi kebutuhan mencuci dan MCK warga memanfaatkan Sungai Enim untuk memenuhi kebutuhan air. Sedangkan untuk keperluan minum dan masak mereka harus mengantri





Gambar 3. Pemanfaatan Lahan PTBA untuk Tempat Pemakaman Umum

dan mengambil air yang jumlahnya sangat terbatas dari saluran pipa PTBA.

Hasil survei menunjukkan bahwa ada 94 % responden yang menyatakan lebih menyenangkan berada di tempat yang lama. Kehidupan yang sekarang nyaman, tenteram dan tidak ada konflik dan kecemburuan sosial antarwarga, mereka sama, senasib dan sepenanggungan. Persepsi seperti ini karena ikatan kekerabatan, dan ikatan bathin yang kuat di antara mereka. Diagram di bawah ini akan memperjelas kenyataan tersebut.

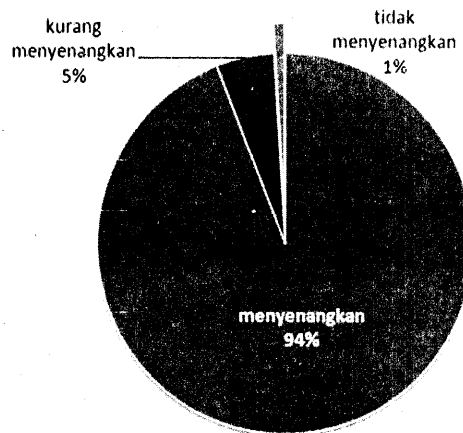
Kekumuhan yang ada ternyata tidak menyurutkan sebagian kecil semangat mereka untuk tetap bertahan di tempat lama, karena kondisi mereka yang sama. Hal tersebut didukung oleh pernyataan seorang informan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) bahwa:

*Tinggal di sini, kemana-mana dekat, mau belanja dan mengantar anak sekolah juga dekat, dan saya sebagai pengojek bisa mangkal di tempat ini juga. Jika tidak ada yang memanfaatkan ojek ya tinggal masuk rumah lagi, kan gak susah (September, 2011).*

Persiapan relokasi yang dilakukan PTBA pada saat akhir penelitian ini telah tuntas dan

mendekati realisasi. Warga masyarakat yang akan direlokasi tidak bisa tetap bertahan di tempat yang sekarang. Sesuai rencana perkembangan dan Penataan Tata Kota Pemda setempat, tempat ini akan dijadikan Taman Hutan Rakyat (TAHURA). Realisasi TAHURA merupakan komitmen PTBA terhadap pembangunan lingkungan yang sejalan dengan kebijakan jangka panjang Pemda Muara Enim dalam merealisasikan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah). Melalui sosialisasi intensif mereka menyadari posisinya sebagai "*pengindung*", kesadaran tersebut memunculkan kesediannya dipindahkan ke lokasi baru. Untuk itu partisipasi warga masyarakat sangat dibutuhkan agar proses relokasi dapat berjalan sesuai dengan harapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akhirnya sebagian besar dari mereka yaitu sebanyak 80 % tidak berkeberatan untuk dipindah, hal tersebut dapat dicermati melalui diagram berikut ini (Gambar 5).

Berdasarkan hasil penelitian, alasan dominan mereka punya motivasi dan setuju pindah karena janji PTBA menyediakan tempat tinggal yang lebih nyaman (Hak



Sumber: Data Primer, September 2011

Gambar 4. Persepsi Responden terhadap Lingkungan Tempat Tinggal yang Sekarang

milik, fasilitas umum yang lengkap, adanya harapan di tempat baru yang bisa memberikan kehidupan lebih baik) telah ditepati. Kesadaran warga muncul karena mereka sudah diberikan tempat yang gratis oleh PTBA, mereka diberdayakan melalui kepemilikan atas tanah dan rumah tinggal, padahal rumah tinggal mereka yang dulu hanyalah hak pakai. Adalah benar PTBA dalam kasus ini belum memberdayakan secara ekonomi, yaitu dalam lapangan pekerjaan dan usaha. Untuk memperjelas hal tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut ini (Gambar 6).

Diagram di atas memperlihatkan bahwa 85 % responden bersedia mengikuti semua aturan PTBA dalam relokasi, Data tersebut dapat dimaknai bahwa munculnya motivasi dan partisipasi warga, karena mereka merasa telah diberdayakan melalui pemilikan rumah dan tanah yang sah secara hukum.

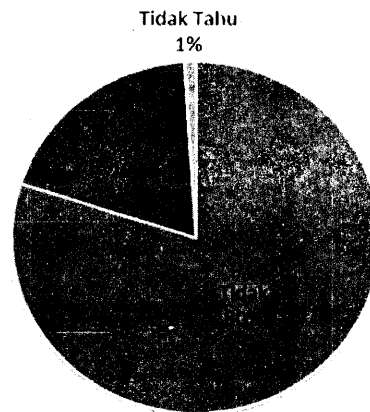
#### Kendala Dan Harapan Relokasi

Ada beberapa kendala dalam proses relokasi, baik yang sifatnya teknis maupun nonteknis. Temuan penelitian menunjukkan adanya stigmatisasi negatif terhadap program PTBA. Kesenjangan yang sangat lebar memunculkan kecemburuan sosial, dan keberadaan PTBA dianggap tidak memberikan kemakmuran bagi masyarakat di sekitarnya. Seorang informan memberikan

pernyataan cukup keras dan penilaian yang sangat negatif terhadap PTBA, seperti yang diungkapkan berikut ini:

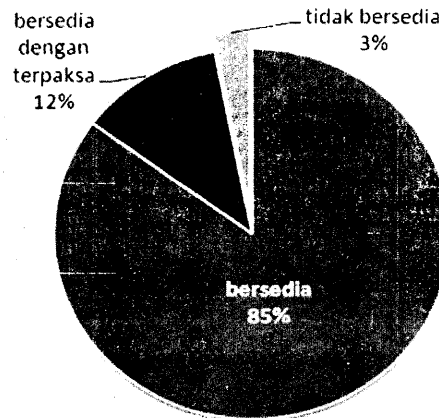
*"Motto PTBA 'Berkembang Harmonis Bersama Masyarakat' hanyalah symbol yang tidak ada buktinya. Sudah sering kita menyampaikan keluhan, tapi sepertinya PTBA tidak mendengarkan, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Tidak ada sama sekali perhatian kepada masyarakat, padahal daerah kita ini ring nol, ring yang seharusnya mendapatkan perhatian utama, tetapi dalam masalah bantuan kita masuk ring terakhir". PTBA itu kalau diluar OK (bagus), tetapi di dalam bobrok, bantuannya tidak sampai di sini".*

Pernyataan tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat, yang dapat menghambat proses relokasi. Di balik kemiskinan yang mereka alami, setiap hari mereka melihat keluarga dan warga PTBA yang lalu lalang dengan mobil bagus dan pakaian yang indah. Menurut pengakuan seorang informan dari PTBA, sebenarnya warga sudah diperhatikan, diberikan tempat tinggal gratis (dulu kakek dan orang tuanya menjadi karyawan PTBA) namun mereka masih saja merasa tidak diperhatikan. Mereka berharap dapat bekerja di PTBA, seperti pendahulunya, namun kemampuan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Para ibu RT dan perempuan muda dari



Sumber: Data Primer, 2011

Gambar 5. Diagram Tanggapan Responden Berkeberatan Dipindah



(Sumber: Data Primer, 2011)

#### Kesediaan Warga Pindah ke Tempat yang Baru

masyarakat sekitar bekerja sebagai, pengurus mess, juru masak dan pembantu rumah tangga karyawan PTBA, sehingga mereka tidak perlu mencari pekerjaan yang jauh, seperti hasil wawancara mendalam berikut ini:

*Penduduk sekitar yang perempuan kebanyakan bekerja di dalam rumah tangga karyawan PTBA, sebagian laki-laki menjadi sopir dan tukang kebun. Memang warga sekitar jarang yang menjadi karyawan dan staff perusahaan, karena tidak memiliki ketrampilan seperti yang dibutuhkan perusahaan, sehingga mereka merasa tidak diperhatikan.*

Kondisi yang demikian ini memunculkan citra negatif pada perusahaan, jika tidak hati-hati dalam membuat kebijakan dapat menjadi boomerang bagi PTBA dan akhirnya dapat

menjadi kendala bagi semua kebijakan yang dilakukan oleh PTBA. Terjadinya kecemburuan sosial yang dirasakan warga masyarakat sekitar menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat akan posisinya dengan apa yang telah diberikan oleh PTBA tidak mampu menjembatani terjadinya gap tersebut. Seorang informan selanjutnya menyatakan bahwa:

*"Kita cukup prihatin kesenjangan sosial masyarakat disini cukup besar, terutama dengan pegawai-pegawai PTBA, kita ini miskin di lahan yang kaya, bak anak ayam mati di lumbung padi. Keberadaan PTBA sepertinya tidak memberikan manfaat yang berarti bagi kita disini, 2 (dua) tahun yang lalu ada penerimaan karyawan tetapi semuanya didatangkan dari luar. Penduduk*

*disini yang sarjana sekalipun jarang sekali yang dapat bekerja di PTBA”.*

Kondisi seperti ini menjadi benturan dalam setiap kebijakan dan program CSR yang digelontorkan oleh PTBA, termasuk program relokasi. Walaupun secara kuantitatif sebagian besar mendukung program, tetapi sebagian yang lain masih tetap memberikan stigmatisasi negatif. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, karena kondisi ini rawan terhadap pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Mereka memiliki peluang untuk bermain di air keruh, dan melakukan provokasi untuk memecah belah masyarakat, yang dapat memunculkan konflik kepentingan. Perlu diciptakan ruang komunikasi antara kedua belah pihak, karena orang miskin merasa tidak ada kepastian hidup, mudah diprovokasi pihak luar yang tidak bertanggung jawab.

Kendala lain adalah, adanya struktur masyarakat yang relatif heterogen dilihat dari status sosial ekonominya. Masyarakat sebagai sebuah sistem sosial, di dalamnya ada strata, demikian juga halnya dengan masyarakat di wilayah Atas Dapur dan sekitarnya. Di wilayah ini ada sebagian warga yang sudah mapan secara sosial ekonomi menjadi persoalan yang rumit untuk direlokasi (ada 12 % yang menerima dengan terpaksa dan 3% yang menolak direlokasi).

Penelitian ini menemukan bahwa mereka mempunyai rumah permanen yang bagus dan luas, sebagian rumahnya disewakan. Atau warga yang memiliki ternak besar (kuda, kerbau dan sapi) yang jumlahnya cukup banyak, dan di tempat baru tidak tersedia lahan untuk menggembala.

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa pada tahun 1997-an pernah ada kebijakan relokasi. Pada saat itu masyarakat yang direlokasi hanya diberi uang pesangon Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut yang kini mereka khawatirkan jika dirinya direlokasi juga hanya akan diberi pesangon yang jumlahnya tidak dapat dipakai untuk membeli rumah. Kondisi tersebut dimaknai warga sebagai tindakan yang tidak manusiawi, sehingga sampai kini masih menyisakan prasangka

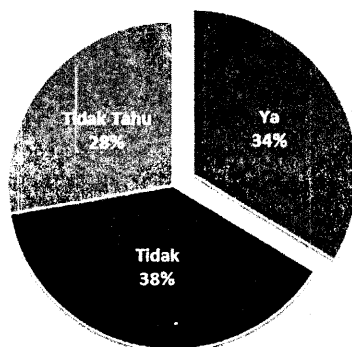
negatif terhadap PTBA, karena hingga tahun 2011 belum ada realisasi relokasi. Melalui FGD diperoleh penjelasan bahwa muncul adanya konflik laten yang telah lama berlangsung. Kurangnya komunikasi memunculkan embrio untuk “melakukan pembangkangan”, Secara jelas seorang informan mengatakan bahwa:

*“Relokasi akan menimbulkan perlawanan (resisten) jika PTBA tidak memenuhi semua janji kepada warga. Kita sudah dilahirkan di sini dan nenek moyang kita juga karyawan di PTBA, sehingga nilai historis ini tidak begitu saja mudah dihilangkan dengan adanya relokasi”.*

Kendala teknis antara lain berkaitan dengan angkutan barang, pola pembagian rumah, waktu pelaksanaan dan sebagian warga ada yang mempunyai binatang ternak seperti kuda, kambing, sapi, ayam, itik dan lain-lain. Bagi masyarakat memiliki ternak punya arti yang sangat penting karena ternak merupakan bentuk tabungan praktis. Apabila membutuhkan dana segar yang mendadak, maka sebagian ternak dijual untuk menutupi kebutuhan mereka. Hal ini menjadi permasalahan karena di tempat pemukiman baru, apabila dilihat design site plannya tidak ada fasilitas untuk tetap beternak.

#### **Mediasi dan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam kegiatan penambangan, sebuah perusahaan wajib memiliki kepedulian sosial dan lingkungan, agar perusahaan tersebut tidak memperoleh gangguan yang berarti, eksis bahkan dapat mendongkrak popularitasnya di mata masyarakat/Negara. Dengan konsep ini antara perusahaan dan masyarakat dapat hidup berdampingan, saling menopang, simbiose mutualistik, sehingga pola hubungan yang tercipta dapat lebih harmonis, sinergis, dan tidak banyak konflik kepentingan antarstakeholders. Fajar Nursahid (2006) menyatakan CSR sebagai tanggung jawab moral sebuah perusahaan terhadap lingkungannya yang terkena pengaruh langsung maupun tidak langsung dari beroperasinya sebuah perusahaan. Demikian juga halnya dengan perusahaan dan pertambangan PTBA.



Sumber: Data Primer, 2011

Diagram: Relokasi Mengganggu Kelangsungan Pekerjaan

Secara geografis relokasi penduduk ke tempat yang baru tidak jauh dengan tempat tinggalnya yang lama, karena berada dalam satu wilayah kecamatan. Kepindahan ini diharapkan tidak banyak mengganggu aktivitas keseharian mereka, termasuk pekerjaan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden (38%) menyatakan bahwa relokasi tidak akan mengganggu pekerjaan, namun sebagian yang lain menyatakan ya dan tidak tahu. Hal tersebut karena selama ini mereka bekerja sebagai tukang ojek, peternak hewan piaraan, dan serabutan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam diagram berikut.

Sebagian besar responden, berharap dapat hidup lebih baik pasca relokasi, salah satu alternatifnya adalah munculnya usaha baru di wilayah relokasi. Harapan tersebut perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, agar kepindahan mereka mampu meningkatkan taraf hidup, relokasi dapat dimaknai sebagai tindakan memberdayakan dalam perspektif yang berkeadilan sosial. Mereka mampu mengembangkan usaha baru, untuk meningkatkan taraf hidup menuju pada kondisi yang lebih baik dan sejahtera.

Alasan penting ketika mereka memutuskan untuk pindah, salah satunya karena kepastian kepemilikan tempat tinggal yang lebih baik dengan status yang jelas. Berdasarkan komitmen PTBA, Kepastian akan diperolehnya hak atas tanah dan rumah menjadi dasar masyarakat untuk menata kehidupannya yang baru. PTBA juga menyediakan fasilitas pendukung seperti

sarana peribadatan, balai pertemuan, pasar, sarana olah raga dan sarana keamanan sebagai kebutuhan hidup. Keberadaan fasilitas pendukung tersebut mempunyai fungsi sosial yang penting bagi keberlangsungan sebuah masyarakat. Melalui FGD diperoleh informasi akan pemenuhan janji PTBA, seperti pernyataan berikut ini:

*"Janji PTBA waktu sosialisasi akan memberikan tempat yang layak, terima kunci, penyediaan air, listrik, jalan, sertifikat. Masyarakat cukup senang dan berharap PTBA merealisasikannya. Harapan kita kepada PTBA juga, pemenuhan fasilitas umum di tempat relokasi, supaya kehidupan di sana bisa lebih baik lagi"* (Jum'at, 23 September 2011, Pukul 09.00-10.00).

Selain fasilitas umum juga disediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kedua fasilitas tersebut menjadi kebutuhan primer untuk mendidik generasi berikutnya dan memelihara kesehatan agar warga dapat hidup lebih sehat. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan, PTBA merintis jejaring dengan pemerintah setempat dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan. Bagi mereka kelangsungan pendidikan anak menjadi satu kebutuhan pokok, sehingga program relokasi tidak mengganggu kelangsungan pendidikan anak-anak.

Berdasarkan temuan penelitian ini, masukan yang dapat disampaikan adalah, agar PTBA lebih pro aktif kepada warga yang akan direlokasi. PSLH – UGM menjadi "penyambung lidah" warga untuk menyampaikan keluhan sekaligus harapan

warga yang akan direlokasi, sedangkan PTBA berupaya memenuhi harapan mereka. Hal tersebut dilakukan pada saat pertemuan terakhir sebagai sebuah kesepakatan kedua belah pihak dan sekaligus kesediaan untuk relokasi. Ini merupakan *best practices* dari sebuah implementasi CSR yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan pertambangan untuk pemberdayaan dan sekaligus pembangunan masyarakat (*community development*) yang berkeadilan sosial.

Berkenaan dengan makam, relokasi makam akan dilakukan dengan biaya yang ditanggung PTBA. Lokasi pemakaman baru berada di Bangko Barat yang tidak jauh, karena masih berada dalam satu wilayah kalurahan. Mengenai pemindahan makam, untuk sementara tidak terjadi gejolak yang berarti terutama bagi keluarga yang meninggalkannya sudah lama. Untuk pemindahan makam PTBA telah menyediakan beberapa mobil jenazah. Berbagai program yang dilaksanakan oleh PTBA dalam rangka memberdayakan masyarakat, sehingga warga dapat hidup lebih sejahtera dan berkeadilan sosial.

### KESIMPULAN

Keberadaan Tambang Bukit Asam yang ada sejak Kolonial Belanda (tahun 1919) kemudian ada Proses Nasionalisasi perusahaan pertambangan tahun 1950, Pemerintah Indonesia mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA). Sebagian besar tenaga kerjanya didatangkan dari berbagai wilayah, salah satunya dari Jawa, (saat ini sudah tiga atau empat generasi), sampai ada istilah PUJAKUSUMA (Putra/i Jawa Kelahiran.

Sumatra). Para migran ini merasa sudah menjadi penduduk asli, karena sebagian besar dilahirkan ditempat ini sehingga mereka "merasa menguasai" lahan yang sebenarnya milik pertambangan. Dalam perkembangannya kebutuhan tenaga kerja semakin profesional, anak-anak karyawan tidak dapat tertampung lagi di perusahaan,

mereka bekerja serabutan asal dapat memenuhi kebutuhan hidup. Tingginya biaya hidup tidak dibarengi dengan motivasi (N'Ach) untuk memperoleh pekerjaan di luar PTBA. Akibatnya wilayah perumahan karyawan menjadi semakin kumuh dan tingkat polusinya tinggi, penduduknya semakin miskin. Dalam kemiskinannya mereka tidak dapat membeli rumah, banyak berhutang, gali lubang tutup lubang sebagai strategi untuk tetap bertahan hidup.

Pada sisi lain muncul kebijakan Pemda setempat untuk penataan ruang tata kota dalam kaitannya dengan perkembangan kota. Perumahan yang ada di wilayah Atas Dapur dan sekitarnya tidak sesuai lagi dengan *site plan* Pemda, dan penduduk harus direlokasi. Untuk melakukan hal tersebut PTBA melalui program CSR berupaya menerapkan kebijakan tersebut, namun penuh dinamika dan permasalahan baik secara internal perusahaan maupun eksternal. Secara internal, kebijakan relokasi ada yang pro dan kontra, secara eksternal warga masyarakat yang akan direlokasi mengajukan banyak tuntutan, sehingga pelaksanaan relokasi menjadi tertunda-tunda. Dampaknya, warga masyarakat menjadi tidak percaya lagi pada janji-janji yang telah lama diberikan. Selain itu ada trauma psikologis dari masyarakat, karena tahun 1990-an pernah ada relokasi dan warga hanya diberi uang pesangon yang jumlahnya sangat kecil sehingga tidak cukup untuk membeli tanah apalagi rumah.

Penelitian ini menemukan bahwa persepsi, motivasi dan partisipasi masyarakat terhadap program relokasi sangat beragam, keberagaman tersebut disebabkan karena perbedaan status sosial dan kondisi pekerjaan yang saat ini dilakukan. Ketidakpercayaan penduduk akhirnya dapat diatasi melalui mediasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh PSLH-UGM, warga yang direlokasi diberdayakan secara sosial dan cultural melalui kepemilikan atas hak milik tanah dan bangunan serta berbagai fasilitas umum, sehingga relokasi yang dijalankan tidak memperoleh kendala yang berarti. PTBA juga merintis melakukan

jejaring dengan warga masyarakat penerima relokasi terutama dalam masalah pendidikan dan kesehatan. Ini merupakan *best practices* dari PTBA yang barangkali dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain yang akan menyalurkan sebagian laba perusahaannya melalui program CSR. Dalam konteks ini CSR yang diberikan dapat memberdayakan sekaligus membangun masyarakat mandiri yang berkeadilan social.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ambadar, Jackie, 2008: *CSR dalam Praktek di Indonesia*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Brannen, yulia, 1997: *Memadu Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Carroll, B. Archie, University of Georgia, 1999: dalam *Journal of Business and Society*, Vol 38, No. 3, September, page 268 – 295, Sage Publication Inc
- Fajar Nursahid, 2006: *Tanggung Jawab Sosial BUMN: Analisis Terhadap Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan PT Telekomunikasi Indonesia*, Jakarta, Depok, Piramedia
- Fernandes, Walter dan Tandon, Rajesh, 1993: *Riset Partisipatoris Riset Pembebasan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Yayasan Karti Sarana Jakarta.
- Ife, Jime, 2002: *Community Development: Community-based Alternatives in Age of Globalization*, Second Edition, Australia, Pearson Education.
- Iwao Taka, 2000: *Corporate Social Responsibility: Current Context and Future Directions*, Reitaku University dalam *Top Management Forum Corporate Social Responsibility*, Asian Productivity Organization
- Komisi Eraopa, 2001 dalam *Gemari 2010: Laporan Utama Program CSR dan Paradigma Baru Pembangunan Kesos*, *Gemari* Edisi 110/Tahun XI/ Maret 2010
- Moir, Lance, 2001: *What Do We Mean By Corporate Social Responsibility*, dalam *Corporate Governance*, Volume 1 Number 2, MCB University Press, page 16 - 22
- Morin, Longinos and Ruiz, Salvador, 2007: "I Need You Too!" Corporate Identity Attractiveness For Consumers and The Role of Social Responsibility, dalam, *Journal of Business Ethics*, 71: page 245 - 260
- Mulyadi, 2003: *Corporate Social Responsibility: Mempertanyakan Kembali Aspek Pemberdayaan, Keberpihakan dan keberlanjutannya*, Seminar Bulanan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada
- Neuman, Lawrence, W 2003: *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Fifth Edition, Printed in the United Status of America
- Okoye, Adaeze, 2009: *Theorising Corporate Responsibility as an Essentially Contested Concept: Is a Definition Necessary*, dalam *Journal of Business Ethics* 89: page 613 - 627
- Rahman, Santy Rizkiya 2009: *Analisis terhadap Corporate Social Responsibility dan Peraturannya di Indonesia, Sebuah Studi Kasus: Corporate Social responsibility PT. Freeport Indonesia pada Suku Amungme, Desa Banti, Papua*, Jakarta, Universitas Al Azhar Indonesia
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989: *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES
- Susanto, AB, 2007: *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, The Jakarta Consulting Group
- Tanudjaja, Bing Bedjo. 2006. *Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia* [dalam http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=DKV](http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=DKV). Diakses pada 26 Oktober 2008
- Untung, Budi Hendrik. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing.
- Hasil Penelitian Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada antara

bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2011.

Yoyner and Paine 2002: Evolution and Implementation: A Study of Values, Business Ethics and Corporate Social Responsibility, dalam *Journal of Business Ethics* 41: page 297 – 311, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands

#### **Dasar Hukum**

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal